

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI
ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN JENEPONTO**

SRI ASTRI KEMUNING

105730455913



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2017

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI
ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN JENEPONTO**

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh sarjana ekonomi
(SE) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

SRI ASTRI KEMUNING

105730455913

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2017



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax. (0411)860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto**

Nama Mahasiswa : **SRI ASTRI KEMUNING**

NIM : 10573 04559 13

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2017 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Oktober 2017

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Mahmud Nuhung, M.A.

NBM: 497 794


Ismail Badollahi, S.E., M.Si. Ak. CA.

NBM: 107 348

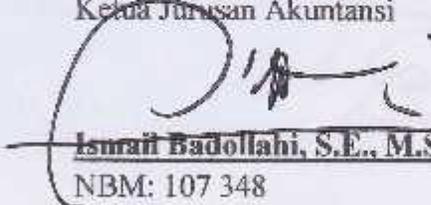
Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis

Ketua Jurusan Akuntansi


Ismail Rasulong, S.E., M.M.

NBM: 903 078


Ismail Badollahi, S.E., M.Si. Ak. CA.

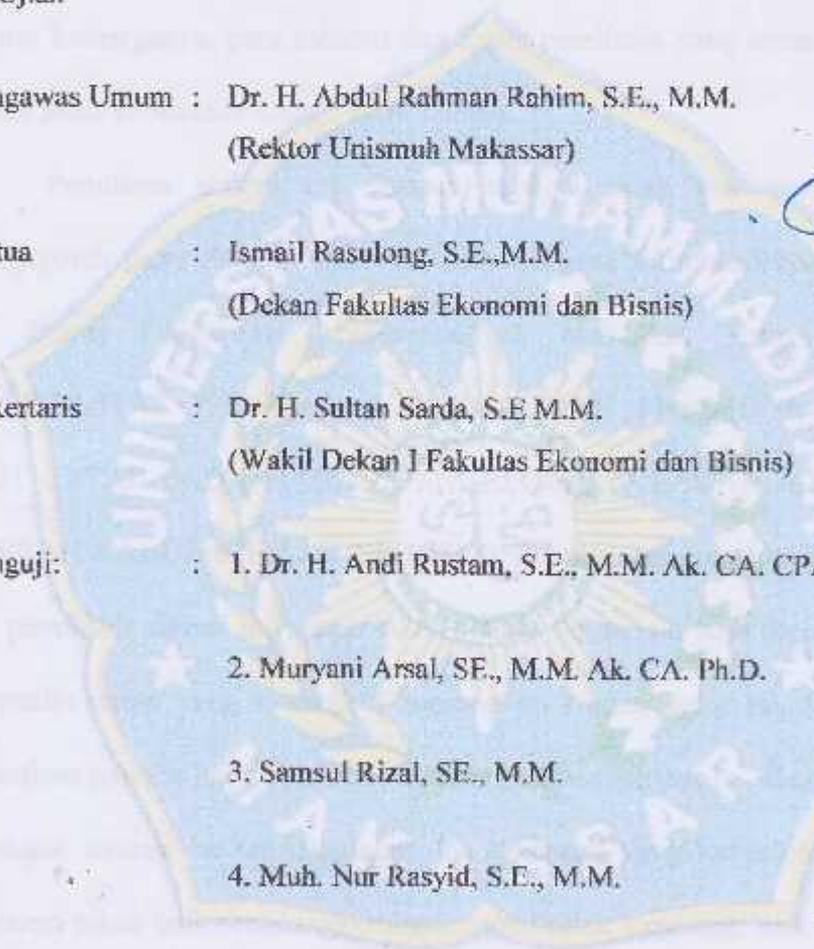
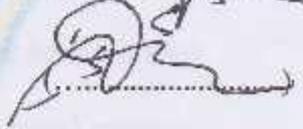
NBM: 107 348

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **SRI ASTRI KEMUNING**, NIM. **10573 04559 13** ini telah diperiksa dan diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: /Tahun 1439 H/2017 M dan telah dipertahankan di depan penguji pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 M, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 24 Muharram 1439 M
14 Oktober 2017 H

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.M.
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, S.E., M.M.
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekertaris : Dr. H. Sultan Sarda, S.E. M.M.
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji: 
 1. Dr. H. Andi Rustam, S.E., M.M. Ak. CA. CPAI. 
 2. Muryani Arsal, SE., M.M. Ak. CA. Ph.D. 
 3. Samsul Rizal, SE., M.M. 
 4. Muh. Nur Rasyid, S.E., M.M. 

ABSTRAK

Sri Astri Kemuning 2017, Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto, pembimbing I: H.Mahmud Nuhung& Pembimbing II: Ismail Badollahi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah/ Aset tetap pada pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto dan kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan. Barang Milik Daerah/ Aset Tetap, sehingga penelitian ini nantinya akan memberikan hasil tentang Apakah pengelolaan Aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan. Sehingga dapat bermanfaat bagi pengelola Barang (BPKAD Kabupaten Jeneponto) dalam upaya lebih memperhatikan pengelolaan Barang Milik Daerah/ Aset Tetap untuk meningkatkan opini BPK dari WDP menjadi WTP.

Dalam mengumpulkan data tersebut menggunakan observasi, wawancara, Studi Pustaka, Dokumentasi, dan internet searching. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian serta mengkajinya dengan kajian pustaka yang telah ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Aset Tetap/ Barang Milik Daerah yang dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto secara keseluruhan telah dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah. Walaupun belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD), Pemanfaatan Barang Milik Daerah hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai, pengamanan yang dilakukan BPKAD Kabupaten Jeneponto tidak melakukan pengamanan hukum.

Kata Kunci : Sistem dan Prosedur Akuntansi, Efektivitas, AsetTetap

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang tiada pembicaraan manapun mampu meliputi segala pujian bagi-Nya. Tiada daya upaya bagaimanapun mampu mencakup bilangan nikmat KaruniaNya. Tiada daya upaya bagaimanapun mampu memenuhi kewajiban pengabdian kepadaNya. Tiada pikiran sejauh apapun mampu mencapai-Nya dan tiada kearifan sedalam apapun menyelami hakikatNya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Salam dan salawat tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa istiqamah di atas jalan kebenaran hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi ini berjudul “EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JENEPONTO”. Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penulisan skripsi ini penuh keterbatasan dan masih jauh dari kesempurnaan. Karenaitu saran yang konstruktif merupakan bagian yang tak terpisahkan dan senantiasa penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Kesulitan-kesulitan itu dapat teratasi berkat kesadaran dan kemauan yang keras dan bantuan Dari beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moral maupun. Material akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan sebagaimana adanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini berkat bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan penghargaan atas segala apresiasi yang telah di sumbangkan kepada penulis serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada :

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM sebagai rector Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, M.A., selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen pengantar perkuliahan yang selalu tulus dalam memberikan bekal ilmu selama pengetahuan ini.
7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan BISnis Universitas Muhammadiyah atas bantuannya selama ini.
8. Kepada pimpinan dan karyawan BPKAD Kabupaten Jeneponto yang telah memberikan pelayanan dan membantu memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

9. Teristimewa kepada Ayahanda Abdurrahman Abbas dan Ibunda Rosmina yang telah mengasuh, mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
10. Adik tercinta, Sri rahayu lestari dan Muh. Resky adithya yang telah memberikan doa, dukungandan semangat demi tercapainya cita-citap enulis. Serta kepada Alfian Syamsuddin atas segala bantuan materil, petunjuk, bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada sahabat-sahabatku Tri EtikaWulandari, AnnisaReksa, Nurfadillah, Yulianti putri, AnnisaFitria, Ramliadi danArdanArdilla, Sri Devi, Sri Ena Wasrini,atas segala perjuangan bersama dalam menyelesaikan pendidikan selama di perguruan tinggi.
12. Rekan-rekan AK 12/2013 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tidak sempat disebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga budi baik yang telah di berikan mendapat imbalan yang berlipat ganda yang diterima di sisi Allah SWT.

Akhirnya tanpa restu dan hidayah dari Allah SWT, maka penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dan layaknya segala pujian dihanturkan ke-hadiratNya.

Penulis hanya mampun tawakkal kepada Allah SWT, semoga skripsi ini dapat diterima sebagai karyailmiah/skripsi yang bermanfaat. Amiin!

BillahiFisabililhaqfastabiqulKhaerat

WassalamuAlaikumWr.Wb

Makassar,

Sri Astri Kemuning

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. EFEKTIFITAS	5
1. Pengertian Efektifitas	5
2. Pendekatan terhadap Efektifitas	6
3. masalah dalam Pengukuran Efektifitas	7
B. SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH	9
1. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	9
2. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset/BarangMilik	

Negara.....	10
3. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.....	11
4. Karakteristik Akuntansi Pemerintah.....	13
5. Tujuan Akuntansi Pemerintah.....	15
C. PROSEDUR AKUNTANSI.....	15
1. Prosedur-Prosedur Akuntansi.....	15
2. Prosedur-Prosedur Akuntansi Non Kasdan SKPD.....	16
D. ASET.....	17
1. Pengerian Aset.....	17
2. Pengolongan Aset Tetap.....	20
3. Catatan Akuntansi Aset Tetap.....	20
4. Tujuan Penyusunan Laporan Aset Tetap.....	21
5. Penelitian Terdahulu.....	22
6. Kerangka Fikir.....	30
7. Hipotesis.....	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu Penelitian.....	32
B. Objek Penelitian.....	32
C. Sumber Dan Jenis Data.....	32
1. Sumber Data.....	32
2. Jenis Data.....	33
D. Metode Pengumpulan Data.....	33
E. Metode Analisis Data.....	34

BAB IV GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
---	----

B. Visi dan Misi Kabupaten Jeneponto	42
C. Visi dan Misi BPKAD Kabupaten Jeneponto	43

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah)	46
B. Siklus pengelolaan aset tetap dan dokumen sumber (Barang Milik Daerah)pada PEMDA Kabupaten Jeneponto	51
C. Sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada BPKAD Kabupaten Jeneponto	55

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
C. Keterbatasan penelitian	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 2 Kelengkapan dokumen sumber.....	53
Tabel 3 Kesimpulan Evaluasi Sistem dan Prosedur Aset Tetap/ Barang Milik Daerah.....	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Pikir	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan sistem pemerintahan dari sistem terpusat menjadi sistem otonomi daerah telah memberi dampak yang besar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup kinerja. Hal ini juga memberi dampak pada pengaturan sistem keuangan pemerintahan di daerah. Otonomi daerah menuntut pemerintahan daerah untuk lebih memberikan pelayanan publik yang didasarkan asas-asas pelayanan publik yang meliputi: transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban demi terciptanya *good governance*.

Sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) dan sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK -SKPD). Sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi, yaitu: prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, selain kas, dan aset.

Pengelolaan keuangan sangat penting dilakukan Pemerintah Kota Jeneponto selaku SKPKD agar anggaran ditetapkan untuk membiayai semua kebutuhan program tiap SKPD yang dijalankan serta realisasinya dapat

sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Dalam kaitannya dengan efektivitasnya penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu SKPD yang memiliki anggaran terbesar di Kota Jeneponto. Hal ini meliputi proses mulai dari penetapan anggaran untuk belanja aset tetap hingga sampai ke fungsi penghapusan aset tetap tersebut. Hal ini tercantum dalam Permendagri nomor 17 tahun 2007 sebagai dasar dalam pelaksanaan pengadaan aset tetap di tiap SKPKD maupun SKPD sehingga dengan adanya ini, baik pemerintah maupun entitas didalamnya dapat berlandaskan peraturan ini.

Aset pemerintah daerah merupakan salah satu elemen dari neraca pemerintah daerah. Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai berbagai hal, misalnya seberapa menarik melakukan investasi di wilayah itu terkait dengan keamanan berinvestasi serta potensi keuntungan yang bias didapat, seberapa nyaman tinggal di daerah tersebut terkait dengan kelengkapan dan prasarana publik, seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerah dan sebagainya. Suatu tantangan bagi pemerintah Kota Jeneponto untuk dapat memenuhi kewajiban dalam hal pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap yang baik dan benar sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara. Tantangan bagi pengelolaan setiap jenis aset akan berbeda, bergantung pada karakter aset tersebut. Sistem pengelolaan yang diterapkan haruslah merupakan

prosedur yang disepakati bersama, antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang terkait lainnya, karena itu pengelolaan aset daerah harus dilandasi oleh kebijakan dan regulasi yang secara lengkap mencakup aspek penting dari pengelolaan financial yang bijaksana, namun tetap memberikan peluang bagi daerah untuk berkreasi menemukan pola yang paling sesuai dengan kondisi dan budaya lokal sehingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar asset tersebut bisa menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Aset jika tidak di kelola dengan semestinya, aset tersebut menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :“Apakah sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jenepono telah diterapkan secara efektif?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui efektivitas atas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jenepono”.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Menambahbahan referensi bagi mahasiswa & pihak-pihak yang memerlukan informasi dan sebagai pembanding antara teori yang di dapat dalam perkuliahan dengan fakta yang ada di lapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis meningkatkan wawasan berfikir ilmiah dan kemampuan menganalisis suatu masalah khususnya dalam hal yang terkait dengan penerapan sistem akuntansi di Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jenepono.
- b. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jenepono dapat dijadikan bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk membuat keputusan bagi pengelolaan keuangan dan aset daerah khususnya prosedur dan sistem akuntansi
- c. Bagi Universitas diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bagi mahasiswa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektifitas

Efektifitas adalah ukuran tingkat pemenuhan output atau tujuan proses. Semakin tinggi pencapaian target atau tujuan proses maka dikatakan proses tersebut semakin efektif.

Supriyono (2000:29) mendefinisikan pengertian efektifitas sebagai hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut. Efektivitas merupakan ukuran mengenai seberapa baik pekerjaan dapat dikerjakan dan sejauh mana seseorang mampu menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan (Kristiani, 2012). Menurut Sajady, et al., (2008) efektifitas sistem didasarkan pada kontribusinya dalam pembuatan keputusan, kualitas informasi akuntansi, evaluasi kinerja, pengendalian internal yang memfasilitasi transaksi perusahaan. Pelaksanaan pengendalian yang dilakukan melalui penerapan akuntansi pertanggungjawaban adalah dengan cara mengelompokkan tanggung jawab dan menggariskan secara jelas hubungan satu bagian dengan bagian lainnya dalam perusahaan, disertai dengan pertanggungjawaban dari masing-masing tingkatan secara terinci.

2. Pendekatan terhadap efektivitas

Pendekatan efektivitas dilakukan dengan acuan berbagai bagian yang berbeda dari lembaga, dimana lembaga mendapatkan input atau masukan berupa berbagai macam sumber dari lingkungannya. Kegiatan dan proses internal yang terjadi dalam lembaga mengubah input menjadi output atau program yang kemudian dilemparkan kembali pada lingkungannya.

1. Pendekatan Sasaran (Goal Approach)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merelalisasikan sasaran yang hendak di capai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur kegiatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. (price,1972:15)

2. Pendekatan Sumber (System Resource Approach)

Pendekatan sumber mengukur efektifitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan system agar dapat menjadin efektif.

3. Pendekatan Proses (Internal Process Approach)

Pendekatan proses menganggap sebagai efesiaen dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancer dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan

memuaskan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

3. Masalah dalam Pengukuran Efektivitas

Efektifitas selalu diukur berdasarkan prestasi, produktivitas dan laba, seperti ada beberapa rancangan tentang memendang konsep ini dalam kerangka kerja dimensi satu, yang memusatkan perhatian hanya kepada satu kriteria evaluasi (contoh produktivitas)

Pengukuran efektifitas dengan menggunakan sasaran yang sebenarnya dan memberikan hasil daripada pengukuran efektifitas berdasarkan sasaran resmi dengan memerhatikan masalah yang ditimbulkan oleh beberapa hal berikut:

1. Adanya macam-macam output

Adanya bermacam-macam output yang dihasilkan menyebabkan pengukuran efektifitas dengan pendekatan sasaran menjadi sulit untuk dilakukan. Pengukuran juga semakin sulit jika ada sasaran yang saling bertentangan dengan sasaran lainnya.

Efektifitas tidak adakan dapat diukur hanya dengan menggunakan satu indicator atau efektifitas yang tinggi pada suatu sasaran yang seringkali disertakan dengan efektifitas yang rendah pada sasarannya.

Selain itu, masalah itu juga muncul karena adanya bagian-bagian dalam suatu lembaga yang mempunyai sasaran yang berbeda –beda secara keseluruhan, sehingga pengukuran efektifitas seringkali terpaksa dilakukan.

Dengan memperhatikan bermacam-macam secara simultan. Dengan demikian, yang diperoleh dari pengukuran efektifitas adalah profil atau bentuk dari efek yang menunjukkan ukuran efektifitas pada setiap sasaran yang dimilikinya. Selanjutnya hal lain sering dipermasalahkan adalah efekuensi penggunaan kriteria dalam pengukuran efektifitas oleh R.M Steers yaitu bahwa kriteria dan penggunaan hal-hal tersebut dalam pengukuran efektifitas adalah:

1. Adaptabilitas dan Fleksibilitas
 2. Produktifitas
 3. Keberhasilan
 4. Keterbukaan dan berkomunikasi
 5. Keberhasilan pencapaian program
 6. Pengembangan program (Streers,1985:4560)
2. Subjektif dalam adanya penelitian

Pengukuran efektifitas dengan menggunakan pendekatan sasaran seringkali mengalami hambatan, karena sulitnya ,mengidentifikasi sasaran yang sebenarnya dan juga karena kesulitan dalam pengukuran keberhasilan dalam mencapi sasaran. Untuk itu ada baiknya bila meninjau pendapat G.W England, bahwa perlu masuk kedalam suatu lembaga untuk mempelajari sasaran yang sebenarnya karena informasi yang diperoleh hanya dari dalam suatu lembaga untuk melihat program yang berorientasi ke luar atau masyarakat seringkali dipengaruhi oleh subjektifitas.

Untuk sasaran yang dinyatakan bahwa bentuk kuantitatif, unsur subjektif itu tidak berpengaruh tetapi untuk sasaran yang dideskripsikan secara kuantitatif,

informasi yang diperoleh akan sangat tergantung pada subjektivitas dalam suatu lembaga mengenai sarannya. Hal ini didukung oleh pendapat Ricard M. Steers yaitu bahwa lingkungan dan keseluruhan elemen-elemen konsektual terhadap informasi lembaga dan membentuk tercapai tidaknya sasaran yang hendak dicapai.

B. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

1. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 yang terdapat pada pasal 232 mendefenisikan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai:“Serangkaian prosedur dan pencatatan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat di lakukan secara manual atau menggunakan computer”.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan sistem akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan standar prosedur yang dapat menghasilkan laporan yang relevan, handal dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan di gunakan oleh pihak intern dan ekstren pemerintah daerah untuk untuk mengambil keputusan ekonomi.

Akuntansi keuangan daerah dalam pelaksanaanya tidak bisa terlepas dari suatu sistem akuntansi karena akuntansi keuangan daerah merupakan suatu kesatuan akuntansi yang dalam prosesnya melibatkan berbagai pihak dalam lingkup satuan kerja baik itu SKPD maupun SKPKD.Sistem akuntansi keuangan daerah sudah mencakup semua prosedur dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang berasal dari APBD baik yang fungsi akuntansi untuk SKPD maupun

fungsi SKPKD. Pengelolaan keuangan daerah di mulai dari perencanaan pelaksanaan pertanggungjawaban hingga pelaporan terangkum dalam suatu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Pada penelitian tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ini telah di fokuskan pada prosedur pelaksanaan akuntansi keuangan daerah apakah sudah sesuai alur yang diterapkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 pada SKPD di Kabupaten Jeneponto.

2. Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Asset/Barang Milik Negara

Pengelolaan aset atau barang milik negara/daerah berdasarkan pada Permendagri no 17 tahun 2007 pasal 4 pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansidan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Hal ini meliputi :

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
2. Pengadaan
3. Penerimaan penyimpanan dan penyaluran
4. Penggunaan
5. Penatausahaan
6. Pemanfaatan
7. Pengamanan dan pemeliharaan
8. Penilaian
9. Penghapusan
10. Pemindahtanganan
11. Pembinaan pengawasan dan pengendalian

12. Pembiayaan

13. Tuntutan ganti rugi

Sistem akuntansi pemerintah daerah di laksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), sedangkan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dilakukan oleh PPK-SKPD.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no.59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi pemerintrah daerah sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut:

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
3. Prosedur Akuntansi Asset Tetap/Barang Milik negara
4. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur atau tahap pelaporan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 antara lain:

1. Pengguna/kuasa pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan
2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui pengelola
3. Membantu pengelola menghimpung laporan sebagaimana di maksud pada ayat (2) menjadi Laporan Brang Milik Negara (LBMD)

3. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Defenisi Sistem Akuntansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah rangkaian sistematis dan prosedur,

penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Sementara itu, dalam Peraturan menteri dalam negeri No. 59 Tahun 2007 pasal 232 juncto, sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai:

“Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencacatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer.”

Indra Bastian (2007:98) memandang sistem akuntansi pemerintah daerah dari proses atau prosedur baik itu dengan menggunakan metode manual maupun secara terkomputerisasi. Prosedur yang dimaksud di mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah daerah.

Dalam peraturan pemerintah No.71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintah. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintah pada pemerintahan daerah diatur dengan peraturan gubernur / bupati / walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan diatur dengan peraturan menteri Akuntansi Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Sistem Akuntansi pemerintahan daerah disusun dengan

berpedoman pada prinsip pengendalian internal sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang akuntansi pemerintahan.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut secara periodic yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran SKPD
- b. Neraca SKPD
- c. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Sedangkan sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi oleh PPK-SKPD.

4. Karakteristik Akuntansi Pemerintah

Menurut baldric dan Siregar (2001:9), terdapat dua jenis batasan hukum dan administrasi yang dikenakan pada proses akuntansi dan pelaporan keuangan organisasi pemerinthan, yaitu:

1. Penggunaan Dana

Dana dalam akuntansi pemerintahan bukan merupakan jumlah aktiva yang disisihkan untuk tujuan tertentu, melainkan merupakan suatu kesatuan akuntansi dan fisikan yang memiliki seperangkat akun yang berimbang sendiri untuk mencatat kas dan sumber keuangan lain. Bersama-sama dengan utang dan saldo ikuitas, serta perubahan-perubahan yang terjadi untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan dan batasan-batasan lain.

2. Peranan Anggaran

Anggaran pada akuntansi pemerintah ditunjukkan untuk perencanaan dan pengawasan aktivitas yang dilakukan. Suatu hal yang membedakan anggaran dalam organisasi pemerintah dengan organisasi komersial adalah terletak pada perencanaannya.

5. Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Abdul halim (2007:35) menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Pertanggungjawaban (*accountability and stewardship*)

Tujuan pertanggungjawaban adalah memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab terhadap operasi unit-unit pemerintahan. Lebih lanjut tujuan pertanggungjawaban ini mewajibkan setiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan.

2. Manajerial

Tujuan manajerial ini berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk merencanakan, penganggaran, pelaksanaa, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah.

3. Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Tujuan sistem akuntansi pemerintah daerah antara lain, menjaga aset melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran. Mardiasmo (2009:14) menyatakan bahwa akuntansi pemerintah merupakan alat informasi yang baik bagi pemerintah sebagai manajemen, maupun alat informasi bagi publik.

C. Prosedur Akuntansi

1. Prosedur-prosedur Akuntansi

- a. Prosedur akuntansi pendapatan, yaitu serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi dimulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang terkait dengan transaksi pendapatan dan penyetorannya, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- b. Prosedur akuntansi belanja, yaitu serangkaian proses baik manual ataupun terkomputerisasi, dimulai dari pencatatan transaksi serta pengikhtisarannya sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terkait dengan belanja. Prosedur akuntansi belanja di SKPD terdiri dari prosedur akuntansi belanja dengan UP/GU, prosedur akuntansi belanja dengan TU, dan prosedur akuntansi belanja Ls.

- c. Prosedur akuntansi aset, yaitu serangkaian proses baik manual ataupun terkomputerisasi, dimulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan pengurangan terhadap aset yang dikuasai/digunakan SKPD. Prosedur akuntansi aset di SKPD terdiri dari prosedur akuntansi aset tetap dan prosedur akuntansi aset lainnya. Prosedur akuntansi aset tetap merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan agar belanja modal yang telah dikeluarkan dapat dicatat dan dilaporkan sebagai aset tetap di neraca. Prosedur akuntansi aset lainnya merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan agar transaksi-transaksi terkait dengan penambahan atau pengurangan aset lainnya dapat dibukukan dan dilaporkan di neraca secara seragam.
- d. Prosedur akuntansi non kas. Transaksi non kas adalah kejadian-kejadian yang memiliki nilai ekonomi yang tidak melibatkan kas, namun bisa terjadi sebagai ikutan dari adanya transaksi kas.

2. Prosedur-prosedur akuntansi non kas di SKPD

1. Prosedur akuntansi koreksi kesalahan, yaitu prosedur akuntansi yang dimaksudkan untuk membukukan tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
2. Prosedur akuntansi pembukuan atas transaksi yang bersifat akrual, yaitu prosedur akuntansi yang dimaksudkan untuk membukukan hak (aset) atau kewajiban pada neraca SKPD yang sudah timbul, meskipun transaksi pengeluaran atau penerimaan kas belum terjadi.

3. Prosedur akuntansi penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka menyusun laporan keuangan pada akhir tahun, yaitu prosedur akuntansi yang dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian atas saldo akun-akun tertentu dalam rangka menyusun laporan keuangan pada akhir tahun.
4. Prosedur akuntansi jurnal penutup, yaitu prosedur akuntansi yang dimaksudkan untuk menutup saldo nominal menjadi nol (0) pada akhir periode akuntansi.

D. Aset Tetap

1. Pengertian Aset

Halim (2012:118) mendefinisikan bahwa aset merupakan sumber-sumber ekonomi yang dikuasai oleh suatu entitas dan masih memberikan kemanfaatan di masa yang akan datang. Suwardjono (2013:253) menyatakan bahwa aset dari definisi yang dikemukakan oleh FASB dan AASB cukup luas dibanding definisi yang lain karena aset disifati sebagai manfaat ekonomik dan bukan sebagai sumber ekonomi karena manfaat ekonomik tidak membatasi bentuk atau jenis sumber ekonomik yang dapat dimasukkan sebagai aset.

1. Pengertian Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Halim, 2012: 117).

2. Konsep Aset Tetap

Mursyidi (2009:182) menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

3. Pengukuran Aset Tetap

Darise (2008:72) menyebutkan bahwa Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Sedangkan biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

4. Pengukuran setelah perolehan (Subsequent Expenditures)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap dimaksud untuk dapat memperpanjang manfaat aset tetap, menambah nilai tercatat aset tetap, dan peningkatan kinerja. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap dapat berupa biaya rehabilitas, renovasi, dan biaya pemeliharaan.

Pengeluaran yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun (memperpanjang manfaat aset tersebut dari yang direncanakan semula atau

peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja) disebut dengan pengeluaran modal (*capital expenditure*) sedangkan pengeluaran yang memberikan manfaat kurang dari satu tahun (termasuk pengeluaran untuk mempertahankan kondisi aset tetap) disebut dengan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*).

5. Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal

Menurut PSAP No. 07 pengukuran aset tetap berikutnya terhadap pengakuan awal disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyusuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset tetap.

6. Penghentian dan pelepasan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan adalah tindakan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/ atau kuasa pengguna/dan atau pengelola dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan Barang milik Daerah meliputi:

- a. Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna,dan
- b. Penghapusan dari daftar barang milik daerah.

7. Pengklasifikasian Aset Tetap

Dalam peraturan walikota tanjungpinang Nomor 28 Tahun 2010 dan PSAP No.7, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Pengklasifikasian asset tetap yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

1. Penggolongan Aset Tetap

Menurut rudianto (2009:273) mengelompokkan aset tetap terdiri dari tiga kelompok besar yaitu:

1. Aset tetap yang umumnya tidak terbatas, seperti tanah tempat atau kantor atau bangunan pabrik berdiri, lahan pertanian, lahan perkebunan lahan danperternakan.
2. Aset tetap yang umurnya terbatas apabila sudah habis masa manfaatnya bisa diganti dengan aktiva lain yang sejenis, seperti bangunan, mesin, kendaraan, computer, mebel dan sebagainya.
3. Aset tetap umurnya terbatas apabila sudah habis masa manfaatnya tidak dapat diganti dengan sejenis, seperti tanah, pertambangan, dan hutan.

2. Catatan Akuntansi Aset Tetap

Catatan akuntansi yang digunakan satuan kerja perangkat daerah mengenai prosedur akuntansi aset tetap (Abdul Halim, 2010:2008) adalah:

1. Buku jurnal umum

Catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi pada PPK/SKPD untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi dan kejadian yang berhubungan dengan aset.

2. Buku Besar

Catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi pada PPK/SKPD untuk memposting semua transaksi dan kejadian buku jurnal umum ke buku besar setiap rekening aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan belanja, dan pembiayaan.

3. Buku Besar Pembantu

Catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi pada PPK/SKPD.

4. Tujuan Penyusunan Laporan Aset Tetap

- a. Untuk menghitung beban penyusutan dalam proses matching. Perhitungan tentang biaya yang akan dibebankan dalam untuk perhitungan net income, lazim dikenal dengan perhitungan dari penyusutan untuk tahun yang berjalan (depreciation expense) secara berkala, adalah tujuan utama dari pelaporan aset tetap.
- b. Untuk memberikan interpretasi ekonomis atas aset tetap. Tujuan kedua dari pelaporan atas aset ini dimaksudkan untuk memberikan indikasi mengenai jumlah kuantitas fisik atau kapasitas produktif yang dimiliki perusahaan.
- c. Untuk menyajikan informasi yang didapat dipakai untuk menduga aliran kas dimasa yang akan datang. Tujuan ketiga dari pelaporan aktiva tetap/asset tetap dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan perusahaan. Sebagai halnya dengan pengelompokan monetary assets dan current asset yang menyajikan informasi tentang kegiatan perusahaan, demikian juga dengan aset tetap, pengelompokkan aset tetap

memberikan pesan-pesan tertentu tentang kegiatan perusahaan. Jumlah yang ditanamkan dalam aset tetap merupakan informasi yang relevan bagi investor dan kreditor karena dapat membantu meramalkan arus kas kemudian hari dan memberikan indikasi tentang waktu yang tepat bagi perusahaan untuk menggaanti aset tetap yang dimiliki.

5. Penelitian Terdahulu

1. Mulianda (2014) : Efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Sitiro, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas PPKAD kabupaten Sitiro pelaksanaanya belum efektif atau belum terlaksana dengan baik.
2. Penambunan (2012) : Analisis efektifitas sistem dan prosedur akuntansi asset tetap pada SKPD Kecamatan Tuminting, dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kantor kecamatan Tuminting telah menjalankan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Riodinar Harianja (2008) : Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah pada satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) pemerintah kabupaten Toba Samosir, dan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Toba Samosir telah menerapkan sistem akuntansi pemerintahan sesuai dengan Permrdagri Nomor 13 Tahun 2006 yang dimulai untuk tahun anggaran 2007.

4. Siama (2008) : Manajemen aset daerah pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tanah Toraja, dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan daerah kabupaten Tanah Toraja dalam pelaksanaannya terhadap pengadaan dan perencanaan aset, pelaksanaan inventarisasi aset dan pelaksanaan pengelolaan pengawasan aset belum terlaksana secara efektif dan efisien.
5. La'saeli (2015) : efektivitas pengelolaan aset daerah pada Dinas PPKAD Kota Bau-Bau, hasil dari penelitian ini menunjukkan yaitu Dinas PPKAD belum efektif pengelolaan aset pemerintah Kota Bau-Bau. Hal ini dilihat dari kemampuan menyesuaikan diri yang masih kurang, produktifitas yang rendah dan kepuasan kerja yang masih relative rendah.
6. Fansuri (2006) : perumusan dan penerapan sistem akuntansi, dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perancangan sampai penerapan model sistem akuntansi pada unit usaha yang bergerak dibidang Manufaktur.
7. Kurnia Sari Pangesti (2008) : Implementasi sistem akuntansi keuangan SKPD: studi kasus penerapan Permedagri Nomor 13 Tahun 2006 dipemerintah daerah Kabupaten Batang, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa unsur-unsur pokok dan pendukung dalam sistem akuntansi keuangan SKPD di Kabupaten Batang berada pada keadaan yang telah sesuai dengan Pemedagri Nomor 13 Thun 2006.
8. Mustika (2012) : Efektivitas penatausahaan aset tetap pada Kota Padang, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap pada

pemerintah kota padang belum dapat mencapai derajat kesesuaian sebesar 100% belum memaksimalkan pelaksanaan penatausahaan di pemerintah kota padang, di sebabkan karena masih banyaknya kendala yaitu, keterbatasan data pendukung aset tetap, sosialisasi peraturan tentang penatausahaan aset masih lemah, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kompensasi yang memadai terhadap kesejahteraan pegawai dibidang penatausahaan aset.

9. Nyemas (2013) : Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten sintang, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah pada DPPKAD Kabupaten Sintang sepenuhnya terlaksana dengan baik sesuai Premedagri No 17 Tahun 2007.
10. Wowor (2015) : Analisis penerapan sistem pengendalian kas pada DPPKAD Kota Tumohon, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian kas telah mengikuti peraturan tentang SIPIP dengan menjalankan lima komponen sistem pengendalian Intern, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian, resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Tabel 1 Ringkasan penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1.	Mulalinda (2014)	Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset Daerah Kabupaten Sitaro.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas PPKAD kab. Sitaro pelaksanaannya belum efektif atau belum terlaksana dengan baik.
2.	Panambunan (2012)	Analisis Efektivitas Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada SKPD Kec. Tuminting.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor kec. Tuminting telah menjalankan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3.	Riodinar Harianja, (2008)	Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pada	Hasil penelitian menunjukkan pemerintah daerah Kabupaten Toba Samosir

		Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.	telah menerapkan sistem akuntansi pemerintahan sesuai dengan Permedagri Nomor 13 Tahun 2006 yang dimulai untuk tahun anggaran 2007.
	Siama (2008)	Manajemen Aset Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Toraja.	Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan aset daerah pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah Kabupaten Tanah Toraja dalam pelaksanaannya terhadap pengadaan dan perencanaan aset, pelaksanaan inventarisasi aset dan pelaksanaan pengelolaan pengawasan asset belum terlaksana secara efektif dan efisien.
5	La'saeli (2011)	Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah Dinas	Hasil penelitian ini menunjukkan yaitu dinas PPKAD belum efektif

		PPKAD Kota Bau-Bau	pengelolaan aset Pemerintah Kota Bau-Bau. hal ini dapat dilihat dari kemampuan menyesuaikan diri yang masih kurang, produktifitas yang rendah dan kepuasan kerja yang masih relative rendah.
6.	Fansuri (2006)	Perumusan Dan Penerapan Sistem Akuntansi	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Perancangan Sampai Penerapan Model Sistem Akuntansi pada unit usaha yang bergerak di bidang Manufaktur.
7.	Kurnia Sari Pangesti (2008)	Implementasi sistem akuntansi keuangan SKPD: studi kasus Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Di Pemerintah Daerah Kabupaten Batang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unsur-unsur pokok dan pendukung dalam sistem akuntansi keuangan SKPD di Kabupaten Batang berada pada keadaan yang telah sesuai dengan Permedagri

			Nomor 13 Tahun 2006.
8.	Mustika (2012)	Efektifitas penatausahaan aset tetap kota padang.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Padang belum dapat mencapai derajat kesesuaian sebesar 100%. Belum memaksimalkan pelaksanaan penatausahaan di Pemerintah Kota Padang, disebabkan karena masih banyaknya kendala yaitu, Keterbatasan Data Pendukung Aset Tetap, Sosialisasi Peraturan Tentang Penatausahaan Aset Masih Lemah, Keterbatasan Sumber Daya Manusia, kurangnya kompensasi yang memadai terhadap kesejahteraan pegawai dibidang penatausahaan aset.

9.	Nyemas (2013)	Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah pada DPPKAD Kabupaten Sintang sepenuhnya terlaksana dengan baik sesuai Permendagri No 17 Tahun 2007.
10.	Wowor (2015)	Analisi Penerapan Sistem Pengendalian Kas pada DPPKAD Kota Tumohon.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian kas telah mengikuti peraturan tentang SIPIP dengan menjalankan lima komponen sistem pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

6. Kerangka Pikir

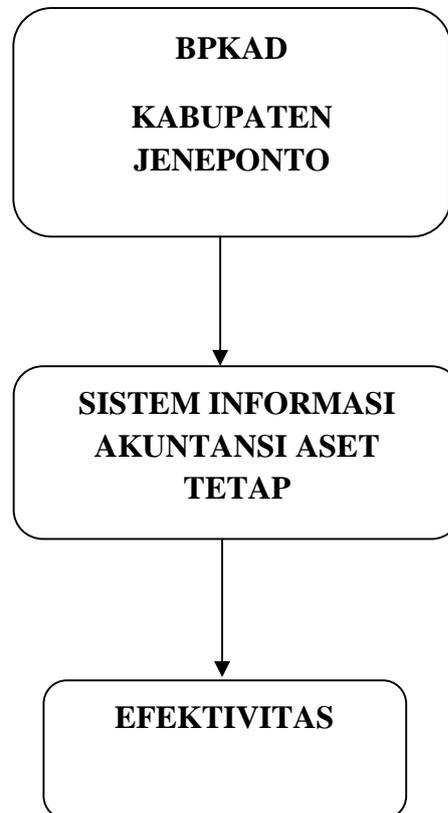
Sekaran (2011:114) mengemukakan bahwa “kerangka teoritis adalah model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa factor yang dianggap penting untuk masalah”.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah dibidang pendapatan, pengelolaan, keuangan dan asset dipimpin oleh kepala dinas dan kedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

BPKAD ini sangat berpengaruh dengan sistem informasi akuntansi aset tetap ini dikarenakan untuk mengetahui sistem kinerja yang dilakukan BPKAD kabupaten jeneponto ini sudah memenuhi syarat yang telah diterapkan sebelumnya guna untuk mengetahui efektifitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap ini

Dengan melihat landasan teori beberapa penelitian terdahulu yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat digambarkan secara sederhana kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Gambar 1 Kerangka Fikir



7. HIPOTESIS

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : “Diduga Penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap telah berjalan secara efektif pada BPKAD Kabupaten Jeneponto”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu Penelitian

Penetapan lokasi dari suatu penelitian sangat penting dalam rangka pertanggungjawaban data yang diperoleh. Oleh karena itu, lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu. Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian yaitu kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto, yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian yang telah dilaksanakan adalah mulai bulan maret sampai dengan bulan april.

B. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian objek penelitian dalam penyusunan tugas skripsi adalah Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada BPKAD Kabupaten Jeneponto.

C. Sumber Dan Jenis Data

Kegiatan penelitian agar terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan adanya data yang bersifat obyektif dan dapat dipercaya kebenarannya.

1. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari BPKAD kabupaten jeneponto.

2. Jenis Data

a. *Data Primer*

Data primer adalah yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat pertama kalinya (Marzuki, 2005:55). Data primer ini diperoleh langsung dari wawancara yang dilakukan kepada karyawan BPKAD kabupaten jeneponto.

b. *Data sekunder*

Data sekunder adalah data yang diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Data yang diperoleh dengan menggunakan literatur yang ada diperusahaan dan juga buku-buku yang berhubungan dengan penulisan Tugas Akhir ini. Data ini diperoleh dengan metode dokumentasi dan studi pustaka.

D. Metode Pengumpulan Data

Salah satu kegiatan dalam penelitian ini adalah merumuskan metode pengumpulan data sesuai dengan masalah yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian antara teori yang digunakan dengan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam studi lapangan ini menggunakan tiga cara yaitu:

1. Wawancara langsung, yaitu dengan melakukan percakapan langsung serta Tanya jawab dengan pihak BPKAD kabupaten jenepono.
2. Studi dokumentasi, dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini.
3. Pengamatan/ observasi, yaitu pengamatan secara langsung serta mengadakan pencatatan secara sistematis pada objek penelitian mengenai hal-hal dan semua kejadian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Analisis Data

analisis data dalam penelitian kualitatif sebenarnya dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Namun dalam kenyataanya, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Adapun tahapan-tahapan analisi data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyino (2010). Yaitu sebagai berikut.

1. Pengumpulan data, yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan.
2. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
3. Sajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tidakan.

4. Kesimpulan data (verifikasi data), berarti bahwa data yang telah disimpulkan masih harus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi data dan model data yang disajikan setelah direduksi.

BAB IV

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada gambaran lokasi pada penelitian ini akan menyajikan dua gambaran umum, yaitu gambaran umum daerah Kabupaten Jeneponto, dan gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto Sebagai Perangkat manajemen aset PEMDA Kabupaten Jeneponto.

1. Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto

Penetapan Hari Jadi Jeneponto sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan waktu yang cukup panjang dan melibatkan banyak tokoh di daerah ini. Kajian dan berbagai peristiwa penting melahirkan beberapa versi mengenai waktu yang paling tepat untuk dijadikan sebagai Hari Jadi Jeneponto.

Kelahiran adalah suatu proses yang panjang, yang merupakan momentum awal dan tercatatnya sebuah sejarah Bangsa, Negara, dan Daerah. Oleh karena itu, kelahiran tersebut memiliki makna yang sangat dalam bagi peradaban manusia. Jeneponto merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian selatan, tumbuh dengan budaya dan peradaban tersendiri seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman. Menyadari perlunya kepastian akan Hari Jadi Jeneponto, maka dilakukan beberapa upaya dengan melibatkan berbagai elemen di daerah ini melalui seminar –seminar yang dilaksanakan secara

terpadu.

Dari pemikiran yang berkembang dalam pelaksanaan seminar tersebut, diharapkan bahwa kriteria yang paling tepat untuk menetapkan Hari Jadi Jeneponto adalah berdasarkan pertimbangan historia, sosio-kultural, dan struktur pemerintahan, baik pada masa pra dan pasca kemerdekaan Republik Indonesia, maupun pertimbangan eksistensi dan norma-norma serta simbol-simbol adat istiadat yang dipegang teguh, dan dilestarikan oleh masyarakat dalam meneruskan pembangunan. Selanjutnya, penelusuran tersebut menggunakan dua pendekatan yaitu tanggal, bulan, dan tahun menurut teks dan tanggal kejadiannya, serta pendekatan dengan mengambil tanggal-tanggal, bulan-bulan maupun tahun-tahun yang mempunyai makna-makna penting yang bertalian dengan lahirnya suatu daerah, yang dianggap merupakan puncak kulminasi peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi.

Diangkatnya kembali raja Binamu setelah berhasil melawan penjajah Belanda. Kemudian tahun 1863, adalah tahun yang bersejarah yaitu lahirnya Afdeling Negeri-negeri Turatea setelah diturunkan oleh pemerintah Belanda dan keluarnya Laikang sebagai konfederasi Binamu.

Tanggal 20 Mei 1946, adalah simbol patriotisme Raja Binamu (Mattewakkang Dg Raja) yang meletakkan jabatan sebagai raja yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Dengan Demikian penetapan Hari Jadi Jeneponto yang disepakati oleh pakar pemerhati sejarah, peneliti, sesepuh dan tokoh masyarakat Jeneponto, dari seminar

Hari jadi Jeneponto yang berlangsung pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2002 di Gedung Sipitangarri, dianggap sangat tepat, dan merupakan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan berbagai kesimpulan di atas, maka Hari jadi Jeneponto ditetapkan pada tanggal 1 Mei 1863, dan dikukuhkan dalam peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2003 tanggal 25 April 2003.

a. Letak Geografis

Kabupaten Jeneponto terletak di ujung bagian barat dari wilayah Propinsi Sulawesi selatan dan merupakan daerah pesisir pantai yang terbentang sepanjang

± 95 di bagian selatan. Secara geografis terletak diantara $50^{\circ} 16' 13'' - 50^{\circ} 39' 35''$

Lintang Selatan dan $120^{\circ} 40' 19'' - 120^{\circ} 7' 51''$ Bujur Timur. Kabupaten Jeneponto berbatasan dengan : Ditinjau dari batas-batasnya maka pada sebelah Utara berbatasan dengan Gowa, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng.

Kabupaten Jeneponto memiliki wilayah seluas 74.979 ha atau 749,79 km². Luas Wilayah Kabupaten Jeneponto tersebut bila dilihat dari jenis penggunaan tanahnya, maka penggunaan tanah yang terluas pertama tahun 1999 adalah Tegalan/Kebun seluas 35.488 ha atau 47,33%, terluas kedua adalah Sawah Panen Satu Kali seluas 12.418 ha atau 16,56%, terluas ketiga adalah Hutan Negara seluas 9.950 ha atau 13,27%,

sedangkan penggunaan tanah untuk Pekarangan seluas 1.320 ha atau 1,76% dan yang terendah adalah Ladang / Huma seluas 31 ha atau 0,04%.

b. Topografi

Kondisi topografi tanah wilayah Kabupaten Jeneponto pada umumnya memiliki permukaan yang sifatnya bervariasi, ini dapat dilihat bahwa pada bagian Utara terdiri dari dataran tinggi dan bukit-bukit yang membentang dari Barat ke Timur dengan ketinggian 500 sampai dengan 1.400 meter di atas permukaan laut.

Daerah ini cocok bila dijadikan sebagai areal pengembangan tanaman hortikultura dan sayur-sayuran.

Dibagian tengah Kabupaten Jeneponto meliputi wilayah-wilayah dataran dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut, dan bagian selatan meliputi wilayah-wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 100 meter di atas permukaan laut.

Daerah ini nilai ekonominya cukup potensial untuk pengembangan tanaman perkebunan dan pertanian tanaman pangan. Pada bagian Selatan meliputi wilayah-wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 150 meter di atas permukaan laut. Daerah ini memiliki nilai ekonomi yang cukup baik bila dijadikan sebagai areal pengembangan industri penggarapan dan daerah ini telah tumbuh usaha penggarapan rakyat

1) Tanah dan Geologi

Dari jenis tanah maka di Kabupaten Jeneponto terdapat 6 (enam)

golongan jenis tanah yaitu :

a) Jenis Tanah Alluvial

Jenis tanah semacam ini terdapat di Kecamatan Bangkala, dan Alluvial Coklat Kelabu terdapat di Kecamatan Binamu dan Tamalate

b) Jenis Tanah Gromosal

Jenis tanah gromosal kelabu terdapat di Kecamatan Bangkala, dan Gromosal Kelabu Tua terdapat di Kecamatan Binamu, Tamalate dan Batang. Gromosal Hitam terdapat di Kecamatan Tamalate, Binamu dan Batang.

c) Jenis Tanah Mediteren

Jenis tanah mediteren coklat terdapat di kecamatan Bangkala, Batang dan Kelara. Sedangkan Mediteren Coklat Kemerah-merahan terdapat di Kecamatan Bangkala, Tamalate, Binamu dan Kelara

d) Jenis Tanah Lotosal

Jenis tanah Lotosal Coklat Kekuning-kuningan terdapat di Kecamatan Bangkala, Tamalate dan Kelara. Sedangkan Lotosal Kemerah-merahan terdapat di Kecamatan Kelara.

e) Jenis Tanah Andosil

Jenis tanah Andosil Kelabu terdapat di Kecamatan Kelara.

f) Jenis Tanah Regional

Jenis tanah Regional Coklat terdapat dilima kecamatan dalam wilayah Kabupaten Jeneponto.

Dengan adanya 6 (enam) jenis tanah di Kabupaten Jeneponto, maka

pola penggunaan tanah di Kabupaten Jeneponto lebih bervariasi dibanding dengan pola dari daerah lain. Pada umumnya penggunaan tanah di Kabupaten Jeneponto disesuaikan pemanfaatannya, lahan yang ada terbagi untuk perkampungan, pesawahan, tegalan, perkebunan, kebun campuran, tambak/empang serta areal hutan, alang-alang dan lain-lain.

2) Musim

Dari jenis tanah maka di Kabupaten Jeneponto terdapat 6 (enam) golongan jenis tanah yaitu:Keadaan musim di Kabupaten Jeneponto pada umumnya sama dengan keadaan musim di daerah Kabupaten lain dalam

Propinsi Sulawesi Selatan. Yang dikenal dengan 2 (dua) musim yakni musim hujan dan musim kemarau. Musim Hujan terjadi antara Bulan nopember sampai dengan Bulan April sedangkan musim kemarau terjadi antara Bulan Mei sampai dengan Bulan Oktober.

3) Curah hujan

Curah hujan di wilayah Kabupaten Jeneponto pada umumnya tidak merata, hal ini menimbulkan adanya wilayah daerah basah dan wilayah semi kering. Curah hujan di Kabupaten Jeneponto yang tertinggi tahun 1999 jatuh pada Bulan Januari sedangkan curah hujan terendah atau terkering terjadi pada Bulan Juni, Agustus, September dan Oktober.

4) Iklim

Ditinjau dari klasifikasi iklim maka Kabupaten Jeneponto memiliki beberapa tipe iklim, tipe iklim tersebut adalah

- a. Tipe iklim D3 dan Z4 yaitu wilayah memiliki bulan kering secara berurutan berkisar 5–6 bulan sedangkan bulan basah 1–3 bulan.
- b. Tipe iklim C2 yaitu wilayah memiliki bulan basah 5–6 bulan dan bulan lembab 2 – 4 bulan. Tipe ini dijumpai pada daerah ketinggian 700–1.727 m diatas permukaan laut yakni pada wilayah kecamatan Kelara.

B. Visi dan Misi Kabupaten Jeneponto

VISI

Menwujudkan pemerintahan yang baik dan penuatan daya saing daerah menuju masyarakat jeneponto yang sejahterah

MISI

1. Menwujudkan tata pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Membangun kemandirian ekonomi masyarakat
4. Meninjau tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel
5. Menwujudkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di setiap desa/kelurahan

6. Meningkatkan kualitas beragama

2. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto.

1. Sejarah Terbentuknya

Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jeneponto dibentuk berdasarkan dengan peraturan daerah no. 03 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas kabupaten jeneponto dan peraturan bupati nomor 25 tahun 2009 tentang tugas pokok dan rincian tugas jabatan pada Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

C. Visi dan Misi BPKAD Kabupaten Jeneponto

VISI

Visi adalah gambaran abstrak, merupakan impian, bayangan yang syarat akan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan dimasa depan yang merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi/unit kerja harus dibawa agar dapat eksis antipatif, inovatif dan produktif untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam artian bahwa visi sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan dari nilai, arah dan komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat diyakini sebagai pengarah dalam pelaksanaan aktivitas dalam pencapaian tujuan organisasi.

Sebagai penguatan organisasi atau unit kerja dan mengoptimalkan kinerja organisasinya maka dirumuskan visi Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jeneponto

“mewujudkan peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui peningkatan pelayanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menyelenggarakan pemerintah daerah”.

MISI

Organisasi yang dibentuk selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu guna mempertahankan keberadaannya ditetapkan misi yang merupakan pernyataan tujuan dan sasaran apa yang ingin dicapai organisasi yang bersangkutan. Misi yang ditetapkan ini menjadi tuntunan bagi manajemen dalam menjalankan organisasinya. Penetapan misi merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan guna mengarahkan operasional kegiatan menuju sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui strategi yang dipilih.

Mengacu pada visi yang telah ditetapkan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto menjabarkan kedalam misi yang harus dilaksanakan yang selanjutnya dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran-sasaran organisasi yang harus dicapai oleh segenap jajaran manajemen. Berkaitan dengan hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto telah merumuskan misi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat pengelola pendapatan pengelola keuangan

dan aset daerah.

- c) Meningkatkan sarana dan prasarana pengelola pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah)

Pengelolaan Aset Tetap yang dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Ketika dikonfirmasi terkait pentingnya aset tetap dikelola, Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah menyatakan Sebagai berikut :

“Aset Tetap ya, Persoalan aset di daerah ini memang itu menjadi suatu masalah yang memang yang sangat membutuhkan perhatian apa namanya, memang setelah dilakukan audit ini beberapa tahun terkahir itu persoalan aset masih tetap menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian. yaa itu, sehingga memang diharapkan kita terus membenahi, terus melakukan langkah-langkah bagaimana sehingga pengelolaan aset itu bisa sesuai betul dengan ketentuan yang ada. Kita kedepan ini memang akan selalu memberikan perhatian – perhatian yang ekstra terhadap aset karena itu selalu menjadi, eee aset ini berkontribusi besar terhadap pemberian opini didalam audit BPK itu. Iya itu, itu besar kontribusinya jadi hehe memang kita anu memberikan perhatian ekstra untuk itu, pengelolaan aset itu”.(Wawancara Tanggal 05 Agustus 2017, Pukul 09:00 WITA)”.

.Transkripsi wawancara oleh Kepala Dinas BPKAD menjelaskan tentang pentingnya Aset Tetap. Dimana menurut beliau bahwa persoalan aset tetap sangat penting untuk dikelola dan butuh perhatian yang sangat ekstra karena berkontribusi besar dan merupakan suatu permasalahan

yang selalu muncul pada opini audit BPK. Hal yang senada juga dinyatakan oleh Seksi Analisis Bidang Aset yang menyatakan Bahwa

“iya de, Barang milik daerah itu sangat penting sehingga membutuhkan perhatian dalam penegelolaannya tetapi sebagian orang tidak mementingkan pelaporan Aset dan hanya berfokus pada keuangan padahal bisa dikatakan bahwa 50% itu berpengaruh pada opini BPK”.(Wawancara Tanggal 05 Agustus 2017, Pukul 10:00 WITA)”.

Berdasarkan pernyataan Seksi Analisis Bidang Aset mengungkapkan pendapatnya mengenai pentingnya aset tetap yang membandingkan sebagian orang yang tidak mementingkan pengelolaan aset tetap dan hanya berfokus pada keuangan. Transkripsi wawancara diatas menunjukkan bahwa pengelolaan aset bisa saja di nomor duakan. Mengapa? Karena perkataan ini “sebagian orang tidak mementingkan pelaporannya dan hanya berfokus pada keuangan” ini menandakan bahwa seseorang lebih memilih bekerja pada bagian keuangan dibandingkan dengan bagian aset.

Begitupun ketika saya menanyakan pentingnya pengelolaan aset tetap kepada kepala bidang aset. Dengan lugasnya menjawab, “sangat penting, Dek”. Sambil terdiam sejenak dan berpikir yang kemudian menyatakan bahwa :

“Aset Tetap di setiap daerah itu jumlahnya sangat banyak sehingga pentingnya manajemen aset untuk ditingkatkan ... begitu juga dalam hasil temuan BPK yang diperoleh Jeneponto selama ini itu terkait masalah aset tetap. Iya memang itu persoalan besar diaset makanya sekarang aset tetap itu butuh perhatian”. (Wawancara

tanggal 05 Agustus 2017, Pukul 14:00 WITA).”

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Pemerintah Pusat akan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Pasal 12 dan 13 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa pendapatan dan belanja dalam APBN dicatat menggunakan basis akrual. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa basis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap daripada basis lainnya. Selain itu, laporan keuangan berbasis akrual juga menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah, evaluasi efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan.

Penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan telah diatur bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013, dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015. Ini berarti pada tahun 2015 setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi pada pemerintah pusat akan mulai menerapkan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Satuan Kerja pada pemerintah pusat sebagai entitas akuntansi yang menjadi bagian dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat tentunya memegang peranan penting dalam menyediakan data dan informasi yang lengkap dan benar demi tercapainya kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Saat ini pemerintah pusat masih menggunakan Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual atau Cash Toward Accrual (CTA) dalam menyusun laporan keuangan pemerintah. Basis akuntansi ini merupakan suatu pendekatan

unik yang dikembangkan oleh Indonesia untuk dapat menyajikan empat laporan keuangan pokok yang diamanatkan Undang-Undang (UU) dan disesuaikan dengan kondisi (peraturan, sistem, sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia) di Indonesia yang sampai dengan tahun 2004 masih menggunakan pembukuan tradisional (single entry) berbasis kas, belum menggunakan akuntansi modern (double entry) sehingga sangat sulit atau bahkan tidak mungkin bila bila langsung menerapkan akuntansi modern berbasis akrual. Basis CTA relatif tidak dikenal di negara-negara lain, yang merupakan pendekatan transisi dari kas menuju akrual yang berhasil. Basis CTA ini pada dasarnya merupakan suatu pendekatan Basis Akuntansi Modified Accrual, sistem akuntansi dan aplikasi komputer yang digunakan dan dikembangkan sendiri.

Dengan penyusunan laporan keuangan dengan akuntansi berbasis CTA, pemerintah pusat saat ini sudah dapat menyediakan laporan keuangan sebagaimana diamanatkan UU, Kementerian/Lembaga juga telah dapat mengimplementasikan relatif cukup baik dan telah cukup baik menyediakan informasi akrual walaupun secara periodik dan dengan usaha-usaha tambahan yang tidak berdasarkan sistem.

Namun ada beberapa hal yang belum bisa dipenuhi dengan akuntansi CTA. Hal pertama adalah laporan keuangan berbasis kas menuju akrual belum memperlihatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan, saat ini hanya fokus pada sumber daya keuangan berupa kas (financial assets). Laporan keuangan juga tidak menggambarkan beban keuangan yang sesungguhnya, karena beban

yang diakrualkan (misalnya beban penyusutan, beban penyisihan piutang tak tertagih, dan beban yang terutang lainnya) tidak diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun laporan lainnya, hanya memberikan gambaran parsial bukan menyeluruh tentang keuangan negara sesuai maksud UU 17 Tahun 2003. Selain itu laporan keuangan berbasis CTA juga kurang memberikan rekam jejak atas perubahan nilai ekuitas pemerintah, karena setiap transaksi terkait aset dan kewajiban akan langsung membebani ekuitas. Dengan demikian informasi akrual hanya dapat disajikan secara periodik yaitu pada saat pelaporan (semester dan tahunan). Bila sewaktu-waktu dibutuhkan informasi hak dan kewajiban maka diperlukan usaha-usaha tambahan yang tidak berdasarkan sistem (by system).

Integrasi dengan SPAN juga sangat sulit dilakukan. SPAN menggunakan Commercial Off The Shelf(COTS) yaitu Oracle Finance yang menyediakan sistem berdasarkan pilihan hanya basis kas atau basis akrual, tidak untuk Modified Accrual sehingga bila menggunakan Kas Menuju Akrual tetap menggunakan aplikasi yang dikembangkan sendiri seperti yang ada saat ini. Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) merupakan Sistem Informasi yang menggabungkan beberapa fungsi, seperti Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Manajemen Kas, Akuntansi dan Pelaporan dalam satu sistem aplikasi. Sistem Informasi Keuangan Negara mengintegrasikan kegiatan mendokumentasikan setiap transaksi keuangan dan mendukung penyajian laporan keuangan dan managerial. SPAN didesain dengan relasi yang baik antara pemilihan software, hardware, SDM, prosedur,

kontrol, dan data dan operasi terotomasi secara penuh serta bermuara pada database yang terpusat. SPAN bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan perbendaharaan negara, menyempurnakan proses bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi keuangan negara yang terintegrasi, memberikan informasi yang komprehensif dan tepat waktu tentang posisi keuangan pemerintah pusat, dan memudahkan pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan pemerintah.

Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana. Akuntansi berbasis akrual merupakan *international best practice* dalam pengelolaan keuangan modern yang sesuai dengan prinsip *New Public Management (NPM)* yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

B. Siklus Pengelolaan Aset Tetap dan Dokumen Sumber (Barang Milik Daerah) pada PEMDA Kabupaten Jeneponto.

Dokumen Sumber adalah semua berkas penting yang dihasilkan dari siklus pengelolaan aset tersebut maupun berkas penting yang mendasari suatu siklus atau tahapan untuk dilakukan. Dokumen sumber ini diperlukan untuk menjadi bukti dalam proses pengelolaan maupun penyampaian akhir dari suatu hasil pelaporan kekayaan daerah yang mempengaruhi penyajian jumlah dan nilai aset suatu daerah. Daftar dokumen sumber yang menjadi acuan

dalam kelengkapan pada penelitian ini tercermin pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dokumen Sumber Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016

1. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
2. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
3. Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah
4. Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
5. Daftar Barang Pengguna / Daftar Barang Kuasa Pengguna
6. Kartu Inventaris Barang
7. Daftar Barang Milik Daerah
8. Buku Inventaris Dan Buku Induk Inventaris
9. Laporan Barang Semesteran Dan Tahunan
10. Laporan Barang Milik Daerah
11. Surat Perjanjian Pinjam Pakai
12. Bukti Kepemilikan Atas Nama Pemerintah Daerah
13. Daftar Hasil Pemeliharaan Barang
14. SK Penghapusan
15. SK Pemindahtanganan
16. SK Status Penggunaan Barang Milik Daerah

Penjelasan di atas, kelengkapan dokumen sumber yang ada pada bidang aset BPKAD Kabupaten Jenepono sesuai hasil wawancara dan beberapa dokumen contoh yang diberikan kepada peneliti dapat dilihat pada

Tabel 2 Kelengkapan Dokumen Sumber

No.	Daftar Dokumen	Ada()/ Tidak (X)	Keterangan
1.	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	✓	Disertai contoh dokumen
2.	Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	✓	Disertai contoh dokumen
3.	Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah	✓	Dari RKBMD dihasilkan DPA dan langsung menjadi DKBMD, tdk
4.	Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	✓	Dari RKPBMMD dihasilkan DPA dan langsung menjadi
5.	Daftar Barang Pengguna / Daftar Barang Kuasa Pengguna	✓	Tidak diberikan contoh dokumen
6.	Kartu Inventaris Barang	✓	Diberikan Contoh Dari KIB A-F
7.	Daftar Barang Milik Daerah	✓	Rekapitulasi Dari KIB A-F
8.	Buku Inventaris Dan Buku Induk Inventaris	✓	Diberikan contoh buku inventaris dari 1 unit organisasi
9.	Laporan Barang Semesteran Dan Tahunan	✓	Diberikan contoh laporan semesteran dan tahunan
10.	Laporan Barang Milik Daerah	✓	Rekapitulasi LBS dan LBT
11.	Surat Perjanjian Pinjam Pakai	✓	Diberikan contoh surat perjanjian pinjam pakai tanah dan bangunan.
12.	Bukti Kepemilikan Atas Nama Pemerintah Daerah	✓	Diberikan contoh SK dan sertifikat tanah
13.	Hasil Pemeliharaan Barang	✓	Hasil Pemeliharaan gedung kantor

14.	SK Penghapusan	✓	Diberikan Sk penghapusan
15.	SK Pemindahtanganan	✓	Diberikan SK hibah tanah
16.	SK Status Penggunaan Barang Milik Daerah	✓	Diberikan SK Status penggunaan Kendaraan

Kelengkapan dokumen sumber tersebut diatas mensyaratkan bahwa Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Daerah telah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dari segi administratif. Akan tetapi Pengelolaan aset negara Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) PP No. 27 Tahun 2014 adalah tidak sekedar *administrative* semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset Negara menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 Ayat 28, Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. (Yusuf, 2010: 31) menyatakan siklus pengelolaan aset adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam manajemen aset.

C. Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada BPKAD Kabupaten Jeneponto

Definisi aset tetap menurut PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Siklus pengelolaan aset tetap adalah rangkaian kegiatan dari proses pengelolaan aset tetap yang merupakan tindakan konkret terhadap daerah dibawah kontrol Peraturan Pemerintah Pusat dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 tahun 2016. Tugas pokok dan fungsi yang wajib dilakukan oleh Bidang. Aset adalah mengusahakan tertibnya administrasi pengelolaan aset tetap serta bertindak sebagai Pembantu Pengelola.

Permendagri No. 19 Tahun 2016 menyatakan ada 13 siklus yang harus dilalui dalam pengelolaan aset namun hanya 9 siklus pengelolaan aset tetap yang melibatkan BPKAD sebagai pembantu pengelola. Pembantu pengelola adalah unit kerja yang membantu pengelola (Sekretaris Daerah) untuk meneliti, menghimpun laporan bahkan menjadi penyelenggara dalam pelaksanaan tahapan pengelolaan barang milik daerah. 9 siklus yang lain tetap dilakukan oleh Pemerintah Kota jeneponto untuk pengelolaan yang baik dan benar, serta dilakukan oleh SKPD sebagai unit organisasi yang menggunakan (pengguna) barang milik daerah untuk menunjang tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD beserta pelaksana teknis sebagai kuasa pengguna.

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai teknis pelaksanaan siklus pengelolaan aset tetap berdasarkan Permendagri No.19 Tahun 2016 serta prosedur yang dilakukan oleh BPKAD Kota jenepono, dalam hal ini Bidang Aset sebagai Pembantu Pengelola.

1. Perencanaan kebutuhan

“Perencanaan Kebutuhan dimulai ditingkat Kuasa Penggunaan Barang, kemudian Penggunaan Barang menghimpun rencana kebutuhan dari tiap-tiap KPB yang selanjutnya disampaikan kepada pengelola barang melalui pembantu pengelola (BPKAD) sebagai Rencana Kebutuhan Pengguna Barang” (wawancara 5 Agustus 2017).

“Selanjutnya pembantu pengelola melakukan penelitian terhadap usulan RKBU dari Pengurus Barang dengan memperhatikan standar kebutuhan, standar harga dan Standarisasi sarana dan prasarana” (wawancara 5 Agustus 2017).

2. Penyusunan perencanaan, penganggaran dan pemeliharaan

“Proses Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan aset tetap setiap tahunnya sudah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan – peraturan walaupun dalam proses tersebut masih terdapat kekurangan-kekurangan seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD)” (wawancara 8 Agustus 2017).

3. Pengadaan Aset Tetap

Pengadaan aset tetap dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang pada dasarnya berawal dari rencana kebutuhan dan rencana anggaran.

Dalam proses pengadaan barang, perusahaan memiliki pertimbangan tersendiri seperti dari segi efisiensi dan efektifitasnya. Proses pengadaan barang dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) barang apa yang dibutuhkan;
- b) dimana dibutuhkan;
- c) bilamana dibutuhkan;
- d) berapa biaya;
- e) siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan;
- f) alasan-alasan kebutuhan;
- g) cara pengadaan.

4. Penatausahaan

Dalam pelaksanaan penatausahaan, jika sudah berpedoman pada aturan yang ditetapkan. “Penatausahaan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (8 Agustus 2017).

5. Pemanfaatan

“Dalam hal pemanfaatan aset daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto pernah melakukan

jenis-jenis pemanfaatan seperti pinjam pakai, penyewaan, bangun serah guna, bangun guna serah” (wawancara 8 Agustus 2017).

6. Pemeliharaan dan Pengamanan

“Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan” (wawancara 8 Agustus 2017).

“Pemeliharaan aset tetap dilaksanakan berdasarkan dan rencana kebutuhan pemeliharaan dan dicatat pada kartu pemeliharaan dan dilaporkan secara berkala” (wawancara 8 Agustus 2017).

Sistem pengamanan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengelola aset tetapnya yaitu sebagai berikut:

- a. Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah meliputi Pengamanan Fisik, Pengamanan administrasi dan Pengamanan Hukum.
- c. Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:
 1. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;
 2. memasang tanda kepemilikan tanah; dan
 3. melakukan penjagaan.
- d. Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:

1. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.
2. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
 - b) membuat kartu identitas barang;
 - c) melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan
 - d) mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/ Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.
3. Pengamanan hukum dilakukan terhadap:
 - a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan
 - b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah.

7. Pemeriksaan dan pengawasan

1. Pengelola Barang melakukan Pengawasan atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemantauan dan investigasi sebagaimana dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat pengawasan intern pemerintah dalam hal ini Inspektorat untuk melakukan audit atas

pelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.

a. Sanksi

Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pemusnahan dan Penghapusan

1. Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila:
2. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
3. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang.
5. Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang.
6. Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam berita acara dan

dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

7. Pemusnahan dilakukan dengan cara:
 - a. dibakar;
 - b. dihancurkan;
 - c. ditimbun;
 - d. ditenggelamkan; atau
 - e. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. penghapusan barang milik daerah jika pengguna barang mengusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.
 - g. Pengguna barang mengusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.
 - h. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
 - i. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
 - j. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan pemindahtanganan atas barang milik daerah disebabkan karena;

- 1) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- 2) menjalankan ketentuan undang-undang.

Tabel 3
Kesimpulan Evaluasi Sistem dan Prosedur Aset Tetap/ Barang Milik Daerah

No	Sistem Pengelolaan Aset/Barang milik Daerah	Permendagri No. 19 tahun 20016	BPKAD Kab. Jeneponto	Keterangan
1	Perencanaan Kebutuhan	Meneliti dan menghimpun DKBMD	Telah di rencanakan sesuai kebutuhan	sesuai
2	perencanaan, penganggaran dan pemeliharaan	Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran	Telah melakukan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran	sesuai
3	Penggunaan	Inventaris, pencatan, digunakan untuk tugas pokok dan fungsi	Telah melakukan penggunaan Inventaris, pencatan, digunakan untuk tugas pokok dan fungsi	sesuai
4	Penatausahaan	Melakukan pencatatan, pendaftara dan pelaporan.	Melakukan pencatatan, pendaftaran dan pelaporan	sesuai
5	Pemanfaatan	Pinjam pakai, Sewa, Kerjasama pemanfaatan, Bagun guna serah, Bangun serah guna.	Pernah melakukan pemanfaatan seperti pinjam pakai.	Sesuai
6	Pengamanan dan pemeliharaan	Pengamanan Adiministratif dan Penggunaan Fisik, Pemeliharaan tanpa merubah bentuk dan keindahan.	Telah melakukan pengamanan administrasi dan penggunaan fisik	sesuai
7	Pemeriksaan dan Pengawasan	Pemantauan, penertiban dan investigasi	Telah melakukan pemantauan, penertiban	sesuai

			dan investigasi	
8	Sanksi dan Ganti Rugi	Kelalaian dan penyalahgunaan/pelanggaran atas pengelolaan barang	Tidak melakukan Kelalaian dan penyalahgunaan/pelanggaran atas pengelolaan barang	sesuai
9	Penghapusan	Mengusulkan aset yang layak untuk dihapus dan melakukan pencatatan terhadap barang yang dihapuskan.	Mengusulkan aset yang layak untuk dihapus dan melakukan pencatatan terhadap barang yang dihapuskan.	sesuai

Sumber: data diolah (2017)

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Sistem dan prosedur Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran,serta perencanaan sudah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melakukan penerimaan sesuai dengan prosedur kemudian barang yang diterima disimpan ditempat penyimpanan sebelum barang disalurkan kepada unit-unit organisasi.
2. Sistem dan prosedur Penatausahaan sudah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melakukan pencatatan dan pendaftaran barang sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) A,B,C,D,E.
3. Sistem dan prosedur Pengamanan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan sudah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Dimana BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melakukan pengamanan secara administrasi dan fisik serta melakukan beberapa bentuk pemeliharaan yang disesuaikan dengan jenis barang.

B. Saran

Berdasarkan uraian penulis di atas mengenai sistem akuntansi aktiva tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto, maka penulis memberikan saran hendaknya:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto menambahkan fungsi riset dan pengembangan dan fungsi aset tetap.
2. Fungsi riset dan pengembangan bertanggung jawab untuk mengajukan usulan investasi aset tetap yang dimanfaatkan bersama oleh lebih dari satu fungsi dan melakukan studi kelayakan setiap usulan investasi dari berbagai fungsi lain dalam perusahaan.
3. Sedangkan fungsi aset tetap bertanggung jawab atas pengelolaan aset tetap perusahaan dalam penempatan, pemindahan dan penghentian pemakaian aset tetap.

C. Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang penelitian ini sedemikian rupa, namun masih terdapat keterbatasan dalam penelitian, yaitu terbatasnya jumlah sampel sehingga peneliti selanjutnya dapat menambahkan jumlah sampel, yang mana nantinya dipergunakan sebagai bukti bahwa telah melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Ni Made Marlita Puji.2014. *Pengaruh Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Pemanfaatan Dan Kesesuaian Tugas Pada Kinerja Karyawan*. Jurusan Akuntansi: Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia.
- Athar, Rima Nazriyati. 2015. *Analisis Penerapan Sitem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau*. Jurusan Akuntansi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Fauziah. 2011. *Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kabupaten Lima Puluh Kota (studi kasus pada badan kepegawaian daerah)*. Jurusan Akuntansi: Universitas Andalas.
- Makagansa, Marcella Daufty Evita. 2015. *Evaluasi Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe*. Jurusan Akuntansi: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Miranda, Andini. 2009. *Sistem Akuntansi Aktiva Tetap Pada Pt.Pln Pesero Pembangunan Sumetra Bagian Utara*. Jurusan Diploma Iii Akuntansi. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Mulalinda, Veronika. 2014. *Efektifitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Asset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Asset Daerah Kabupaten Sitaro*. Jurusan Akuntansi: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Ningsih, Fitri. 2013. *Analisi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pada Kantor Camat Pendalian IV Kota Kabupaten Rokan Hulu*. Jurusan Akuntansi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Permadi, Angga Dwi. 2013. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi kasus pada dinas bina marga provinsi jawa barat)*. Jurusan Akuntansi: Universitas Widyatama Bandung.
- Suryanovi, Sri. 2010. *Sistem dan Prosedur Akuntansi SKPD*. Kementrian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan PUSDIKLAT Kekayaan Negara Dan Perimbangan Keuangan
- Tandaju, Ivana Penggei. 2015. *Evaluasi Penerapan Pengendalian Indern Siklus Penerimaan Kas Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Da*

Asset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jurusan Akuntansi: Universitas Sam Ratulangi Manado.

Yanis, Irene Sutri. 2015. *Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2007 Pada Dinas Pendidikan Kota Manado.* Jurusan Akuntansi: Universitas Sam Ratulangi Manado.

BIOGRAFI PENULIS



SRI ASTRI KEMUNING lahir pada tanggal 27 Mei 1996 di Tamanroya Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan keluarga Abdurrahman Abbas dan Rosmina. Jenjang pendidikan pertama SDN 07 Lassang-Lassang Kabupaten Jeneponto dan

Selesai pada 2007, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Arungkeke Kabupaten Jeneponto selesai pada tahun 2010. Dan di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Batang Kabupaten Jeneponto dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Tahun 2016 penulis melaksanakan kuliah kerja profesi (KKP) selama dua bulan di Kantor KPP Pratama Bantaeng. Penulis mendapatkan gelar SE di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2017.